

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ditengah perkembangan era globalisasi saat ini, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkarakter, berkompetensi, berintegritas, dan bermental jujur sangatlah dibutuhkan. Jika dibandingkan dengan negara lain mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal, baik pendidikan formal maupun informal. Selain mutu pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia juga masih belum merata terutama di daerah terpencil. Belum meratanya pendidikan di Indonesia dikarenakan oleh berbagai hal, mulai dari sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak, kurangnya kesejahteraan guru dan permasalahan lainnya. Permasalahan tersebut akan menghambat penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Dalam hal ini sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memberikan bantuan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 20% dari total pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya bantuan tersebut tidak digunakan sesuai dengan semestinya. Maka dari itu perlu diadakan semacam manajemen keuangan untuk menopang keberlangsungan kegiatan dan program pendidikan di sekolah.

Berbicara mengenai pendidikan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung tercapainya pendidikan, salah satunya yaitu dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Dana pendidikan merupakan faktor penting dalam menghasilkan siswa yang berkualitas di suatu sekolah. Artinya sekolah memerlukan dana untuk membiayai berbagai keperluan sekolah, seperti untuk gaji pegawai, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, serta biaya penyelenggaraan pendidikan yang lainnya. Mustahil jika pendidikan akan berjalan dengan lancar sedangkan dana pendidikan yang tersedia sangatlah minim. Karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan.

Begitu pentingnya pendanaan pendidikan sehingga menjadi salah satu penentu tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa:

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Agar tujuan pendidikan bisa tercapai, sekolah dituntut untuk mengelola dana pendidikan secara optimal. Penerapan pengelolaan keuangan sekolah merupakan salah satu usaha untuk mengangkat mutu dan kualitas pendidikan secara efektif dan produktif. Melalui kegiatan pengelolaan keuangan sekolah, kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, serta digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah. Menurut Depdiknas (2000) pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya menyangkut soal kegiatan tatausaha sekolah, melainkan menyangkut semua kegiatan sekolah, baik mengenai materi, personalia, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum dan sebagainya, yang harus diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana yang belajar mengajar seperti yang diharapkan serta mampu mencapai tujuan pendidikan. Tanpa adanya pengelolaan keuangan sekolah yang baik, sulit kiranya bagi sekolah untuk menuju tujuan pendidikan yang seharusnya di capai sekolah. Pembiayaan sekolah yang terorganisir akan mampu mengoptimalkan layanan pendidikan kepada siswa, orang tua, masyarakat, dan lainnya. Karena baik buruknya pengelolaan keuangan sekolah akan berpengaruh pada kualitas pelayanan pendidikan.

Sekarang ini masih banyak institusi pendidikan yang belum melakukan pengelolaan keuangan sekolah secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan sasaran atau tujuan sekolah yang seharusnya bisa dipenuhi ternyata tidak bisa diwujudkan. Seperti yang kita ketahui, bahwa dana pendidikan yang mampu disediakan pemerintah sangat terbatas dan kondisi

perekonomian masyarakat yang masih rendah. Maka dari itulah, jika perencanaan anggaran tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, yang terjadi ialah tujuan sekolah menjadi tidak tercapainya.

Suatu sekolah dapat berjalan dengan baik dan terarah, jika setiap tahun pelajaran sekolah itu menentukan dan membuat dahulu rencana yang akan dijalankan di tahun tersebut. Rencana atau program sekolah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Agar program-program sekolah dapat dilaksanakan sesuai dengan jumlah dana yang ada, ada beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pembiayaan pendidikan yaitu: konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan dalam penganggaran pendidikan, penentuan prioritas kebijakan penganggaran pendidikan, penentuan standarisasi dalam penganggaran pendidikan, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M Abid Dzulfikar (2005) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal telah dilakukan secara adil dan efisien dengan memenuhi peraturan yang berlaku. Sedangkan hal berbeda terjadi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septi Marliyani (2015) dengan judul “Kesesuaian Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2014/2015 di SD Negeri 2 Jati Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian RKAS masih rendah, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya yaitu terjadi keterlambatan pencairan dana BOS serta pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal.

Menurut penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan sekolah, terutama di sekolah Muhammadiyah. Dapat diketahui bahwa sumber dana yang diterima sekolah swasta (Muhammadiyah) dari pemerintah jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sumber dana yang diterima di sekolah negeri. Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui kesesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah di SMA Muhammadiyah se-Surakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah se Surakarta?
2. Bagaimana realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah se Surakarta?
3. Seberapa besar realisasi anggaran terhadap perencanaan anggaran di SMA Muhammadiyah se Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perencanaan dalam pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah se Surakarta
2. Menganalisis realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan di SMA Muhammadiyah se Surakarta
3. Mengetahui prosentase realisasi anggaran terhadap perencanaan anggaran di SMA Muhammadiyah se Surakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang merupakan bagian dari manajemen pendidikan khususnya pengelolaan keuangan sekolah

b. Memberikan sumbangan ide mengenai kajian teoritis dan konsep tual mengenai pengelolaan keuangan sekolah

2. Secara Praktis

a. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan berguna untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan sebagai upaya dalam mengembangkan kualitas pelayanan sekolah. Serta memberikan gambaran umum mengenai pentingnya perencanaan dalam penggunaan dana sekolah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan proses pengelolaan keuangan sekolah, sehingga masyarakat dapat lebih kritis terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini digunakan sebagai acuan pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan sekolah.